DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA BATAM

EVALUASI HASIL RENJA SEMESTER 1

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Semester I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja dan keuangan, kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian target, serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan laporan evaluasi pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan Evaluasi Capaian Hasil RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Semester I Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro,

Salim, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda -/IVc
NIP. 198709262007011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL IV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Metode Pelaksanaan 6

1.5 Keluaran/Output 7

1.6 Sistematika Laporan 7

BAB II KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2025-2029 DAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2026 9

2.1 Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 9

2.1.1 Tujuan dan Sasaran 9

2.1.2 Strategi dan Kebijakan 10

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 12

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 12

2.2.2 Program dan Kegiatan 12

BAB III EVALUASI HASIL KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2026.15

3.1 Keselarasan Antar dokumen Perencanaan dan Penganggaran 15

3.1.1 Keselarasan Program Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2026 16

3.1.2 Keselarasan Kegiatan Renja Tahun 2026 dengan Renstra Periode

2025-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 21
3.1.3 Keselarasan Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 dengan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.. 23
3.1.4 Keselarasan Program Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 24
3.1.5 Keselarasan Kegiatan Renja dan APBD 27
3.1.6 Keselarasan Sub Kegiatan Renja dengan APBD 29
3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026 30
3.2.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026 31
3.2.2 Capaian Prioritas dan Sasaran serta Program Perangkat Daerah dalam Renja * Tahun 33
3.2.3 Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026 34
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT SERTA TINDAK LANJUT YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA RENJA BERIKUTNYA 35
4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Dinas Batam Kota 35
4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 35
4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Prioritas dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 38
4.1.3 Faktor Pendorong dan Penghambat terhadap Pelaksanaan Sub Kegiatan 40
BAB V PENUTUP 45
5.1 Kesimpulan 45
5.2 Rekomendasi 46

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penahapan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 10

Tabel II. 2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Batam Kota 11

Tabel II. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 13

Tabel III. 1 Sandingan Program RENSTRA Periode 2025-2029 dengan RENJA Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 19

Tabel III. 2 Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam . 22

Tabel III. 3 Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Batam Kota 24

Tabel III. 4 Sandingan Program RENJA Tahun 2026 Dengan Program APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 26

Tabel III. 5 Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 28

Tabel III. 6 Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 30

Tabel III. 7 Predikat/Kategori Penilaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 30

Tabel III. 8 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RENSTRA Periode 2025-2029 32

Tabel III. 9 Capaain Indikator Kinerja Program dan Anggaran Dinas Batam Kota 34

Tabel IV. 1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 35

Tabel IV. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Prioritas dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 38

Tabel IV. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat terhadap Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Gambar III. 1 Irisan Kesesuaian Program RENSTRA Periode 2025-2029 dan RENJA Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 17

Gambar III. 2 Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 21

Gambar III. 3 Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 23

Gambar III. 4 Irisan Kesesuaian Program Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 25

Gambar III. 5 Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 27

Gambar III 6 Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 29

BAB I
PENDAHULUAN

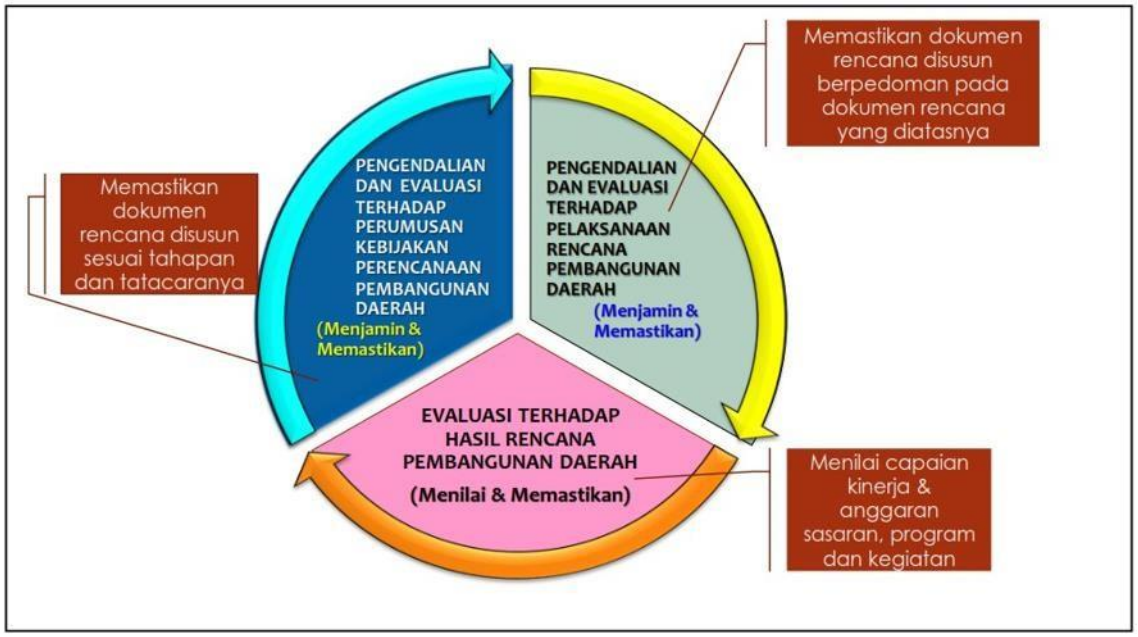
1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Lebih rinci mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam rangka mengukur capaian pembangunan jangka menengah, maka secara berjenjang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra PD, serta pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD dan Renja PD. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Gambar I.1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah



Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029, pelaksanaan pembangunan dalam kurun tahun 2026 sampai 2030 berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan APBD Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, juga disusun dengan memedomani Renja dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun berkenaan, dan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dipantau dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam secara berkesinambungan

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan daerah tahun 2026, maka pemerintah daerah yang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam melakukan Evaluasi Hasil terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026. Evaluasi Hasil terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 diperoleh dari Evaluasi Hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah pada semester 1 yang terdiri dari Triwulan I dan Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mencakup seluruh pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 antara lain pencapaian indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan sub kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2028. Selain itu, dokumen ini juga menjadi input bagi penyusunan reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 yang dilakukan pada masa mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2026 berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Evaluasi Hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 adalah untuk memperoleh informasi capaian pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun melalui berbagai indikator pembangunan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target-target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini, yaitu:

1. Teridentifikasinya capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026;
2. Teridentifikasinya capaian indikator kinerja dan anggaran program perangkat daerah tahun 2026;
3. Teridentifikasinya capaian kinerja dan anggaran sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan semester I 2026;
4. Teridentifikasinya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026;

5. Teridentifikasinya faktor penghambat dan pendorong pencapaian target kinerja dan anggaran kegiatan perangkat daerah;
6. Teridentifikasinya konsistensi penjabaran program Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ke Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan APBD Tahun 2026; dan
7. Tersusunnya kesimpulan dan rekomendasi bagi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun berikutnya.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pelaksanaan evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam berasal dari laporan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh seluruh perangkat daerah. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup capaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta realisasi anggaran yang selanjutnya diolah menjadi bahan evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Selain berasal dari perangkat daerah, data pendukung juga diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga terkait, dan sumber data resmi lainnya. Data yang telah dihimpun kemudian disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk dilakukan pengolahan, verifikasi, dan analisis guna memperoleh informasi capaian pembangunan daerah. Hasil pengolahan data selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

1.4.2 Analisis

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan ketercapaian pelaksanaan pembangunan daerah. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dibahas dan dikonfirmasi bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan validitas capaian kinerja pembangunan daerah. Analisis yang dilakukan antara lain meliputi:

a. Penghitungan tingkat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran

b. Penghitungan capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta realisasi anggaran;
c. Penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
d. Analisis keselarasan program RKPD dengan RPJMD, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan APBD;
e. Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target pembangunan daerah; dan
f. Perumusan kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

1.4.3 Penyajian Laporan

Hasil analisis evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam disajikan dalam bentuk dokumen laporan yang memuat capaian kinerja pembangunan daerah, realisasi anggaran, permasalahan pembangunan, serta rekomendasi tindak lanjut. Dokumen laporan disusun dalam bentuk softcopy dan hardcopy sesuai kebutuhan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5 Keluaran/Output

Subbab ini memuat keluaran (*output*) sebagai berikut:

a. Laporan Evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 Semester I

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, metode pelaksanaan, keluaran/output, serta sistematika laporan.

Bab II. Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 Dan Tujuan Dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan jangka menengah daerah Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam Tahun 2025–2029, yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 sebagai bentuk penjabaran tahunan dari agenda pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, seluruh arah pembangunan yang dirumuskan diharapkan tetap selaras, terukur, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Batam.

Bab III. Evaluasi Hasil Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 Bab ini memuat keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan daerah sampai dengan semester I (satu) tahun 2026.

Bab IV. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Serta Tindak Lanjut yang Dibutuhkan Untuk Pencapaian Target Kinerja Renja Berikutnya

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026. Selain itu, bab ini juga menguraikan faktor pendorong dan penghambat pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2026 dan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan tahun berikutnya dan jangka menengah periode berikutnya.

BAB II
KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2025-2029 DAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2026

2.1 Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025–2029 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ***good governance*** sesuai dengan arah pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029.

Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Tabel II. 1
Penahapan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Pemantapan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Percepatan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Perwujudan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Pemantapan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Percepatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Perwujudan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Pengembangan usulan masyarakat yang terakomodir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Peningkatan usulan masyarakat yang terakomodir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Pemantapan usulan masyarakat yang terakomodir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Percepatan usulan masyarakat yang terakomodir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Perwujudan usulan masyarakat yang terakomodir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Pengembangan koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Peningkatan koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Pemantapan koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Percepatan koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Perwujudan koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Pengembangan Peran Dinas Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Peningkatan Peran Dinas Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Dinas Batam Kota	Pemantapan Peran Dinas Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Dinas Batam Kota	PercepatanPeran Dinas Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Perwujudan Peran Dinas Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Dinas Batam Kota

Arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka

mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Tabel II. 2
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No	Opersionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya pelayanan public	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkantoran	
		Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta kolaborasi antar instansi dalam rangka Kesinambungan Pelayanan	Meningkatkan kualitas SDM	
			Meningkatkan kualitas perencanaan	
			Meningkatkan pemenuhan layanan admininstrasi keuangan dan kepegawaian	
			Meningkatkan Partisipasi Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) dalam pelaksanaan musrenbang tingkat Dinas dan kelurahan	
			Meningkatkan inovasi kelurahan dalam tata kelola pemerintahan	
			Meningkatkan partisipasi kelurahan dan Dinas dalam pendataan stunting	
			Peningkatan peran serta PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK	
			Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman	
			Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	
			Melaksanakan patroli untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	
			Menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar nasional	
			Memberikan apresiasi kepada RT, RW dan LPM di Dinas	

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 mengacu secara langsung pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025–2029. Penetapan tujuan, sasaran, beserta target-target kinerjanya diarahkan untuk memandu pelaksanaan program dan kegiatan prioritas selama tahun 2026 agar berjalan efektif, transparan, serta berkelanjutan.

Secara umum, terdapat 1 tujuan dan 1 sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada tahun 2026, adapun tujuannya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dan adapun sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dengan indikator Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana

2.2.2 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dimulai dari

tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2030.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada renja tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
				7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				7.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Dinas	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Dinas dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Dinas

BAB III

EVALUASI HASIL KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2026

3.1 Keselarasan Antar dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan dalam hal ini Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 bertujuan untuk melihat konsistensi antar dokumen perencanaan antara RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan APBD yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota. Dalam evaluasi tersebut Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disampaikan kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Walikota Batam dalam hal ini Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota. Evaluasi perumusan kebijakan Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan terhadap RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 2026 dilakukan realisasi capaian kinerja sampai dengan Semester 1 terhadap target RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 2026 dan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 2025-2029.

Berdasarkan pada RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026, bahwa dalam penyusunan RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan

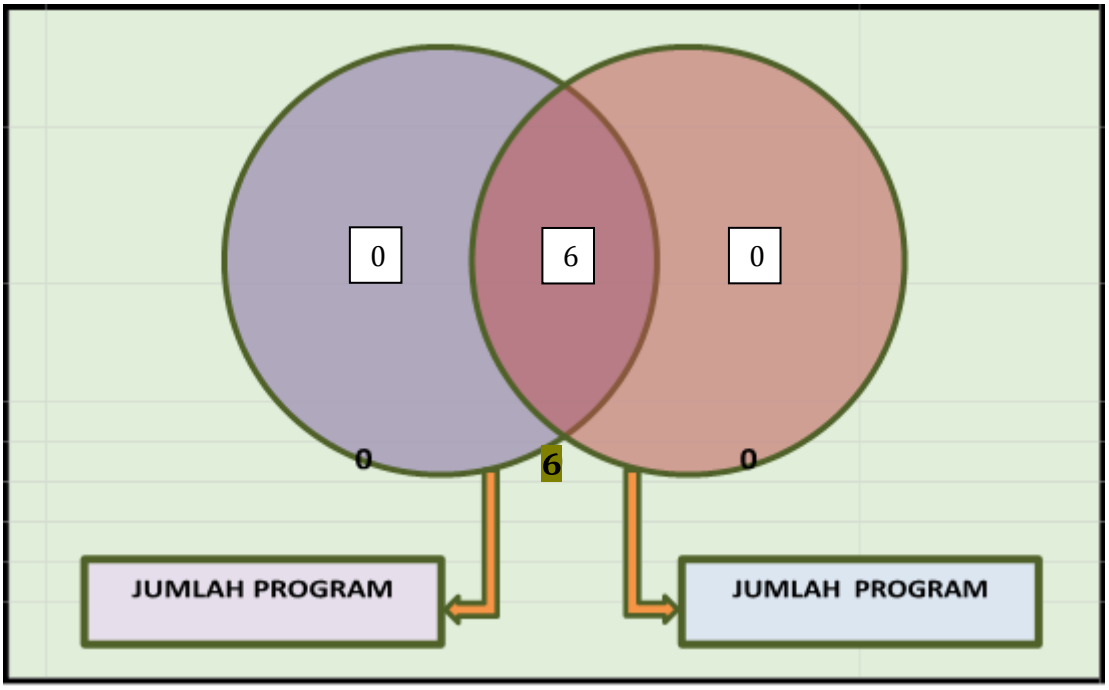
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan RENJA Dinas Batam Kota Tahun anggaran 2026 telah mendasarkan pada RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029.

3.1.1 Keselarasan Program Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2026

Hasil evaluasi terhadap keselarasan dokumen perencanaan menunjukkan bahwa narasi tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam) Kota Batam Tahun 2025–2029 telah selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam) Tahun 2026. Keselarasan tersebut tercermin pada rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, hingga target capaian yang digunakan, dimana secara keseluruhan terdapat 6 tujuan dan 16 sasaran pembangunan daerah yang seluruhnya telah konsisten antara kedua dokumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 telah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Adapun matriks keselarasan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja secara lengkap disajikan pada lampiran I.

Selain keselarasan pada tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja pembangunan daerah, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa arah prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam Tahun 2025–2029 telah selaras dengan prioritas pembangunan pada RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026. Keselarasan tersebut mencerminkan adanya konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Gambar III. 1
Irisan Kesesuaian Program RENSTRA Periode 2025-2029 dan RENJA Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Berdasarkan Gambar 3.1, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menetapkan 6 Program dalam dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 dan juga 6 Program dalam dokumen Perubahan RENJA Tahun 2026.

Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa seluruh program pada RENJA telah selaras 100% dengan program pada RENSTRA, sebagaimana terlihat pada irisan diagram Venn sejumlah 6 Program. Selain itu, tidak ditemukan adanya program dalam RENSTRA yang tidak diakomodir dalam RENJA Tahun 2026, maupun program dalam RENJA Tahun 2026 yang tidak memiliki dasar dalam RENSTRA. Kondisi tersebut diindikasikan dengan nilai 0 pada masing-masing segmen non-irisan dalam diagram.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan program pada Perubahan RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 telah sepenuhnya mengacu pada RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029.

Kesesuaian 100% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2026 telah berada pada koridor pencapaian sasaran dan target jangka menengah daerah.

Tabel III. 1
Sandingan Program RENSTRA Periode 2025-2029 dengan RENJA Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

NO.	PROGRAM RENSTRA TAHUN 2025 - 2029	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	NO.	PROGRAM RENJA TAHUN 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	SELARAS/ TIDAK SELARAS/ TIDAK DIAKOMODIR		PERMASALAHAN KETIDAK SELARASAN/ TIDAK DIAKOMODIR
								PROGRAM	TARGET INDIKATOR	
Urusan Unsur Kewilayahan										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	85,3%	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	Selaras	Tidak Selaras	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	31,81%	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	36,99%	Selaras	Tidak Selaras	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	39,8%	3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	42,3%	Selaras	Tidak Selaras	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	47,15%	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	30.78 %	Selaras	Tidak Selaras	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	72,51%	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	79,52%	Selaras	Tidak Selaras	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	58,07%	6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	58,07%	Selaras	Selaras	
Total	6	6			6	6				
Jumlah Program RENJA yang SELARAS dengan RENSTRA:								6		
Jumlah Program RENSTRA yang TIDAK SELARAS dengan RENJA :								0		
Jumlah Program RENSTRA yang TIDAK DIAKOMODIR/TIDAK ADA di dalam RENJA:								0		
Jumlah TARGET INDIKATOR Program RENJA yang SELARAS dengan RENSTRA :									1	
Jumlah TARGET INDIKATOR Program RENJA yang TIDAK SELARAS dengan RENSTRA :									0	
Jumlah INDIKATOR Program RENSTRA Yang Tidak Ada di dalam RENJA :									0	

Berdasarkan hasil penyandingan sebagaimana tercantum pada Tabel III.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keselarasan Program

   Pada Tahun 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menetapkan 6 Program dalam dokumen RENJA. Kelima program tersebut merupakan penjabaran dari 6 Program yang terdapat dalam RENSTRA Tahun 2025-2029. Hasil analisis menunjukkan bahwa 100% program RENJA 2026 telah selaras dengan program RENSTRA. Tidak terdapat program dalam RENJA yang tidak selaras dengan RENSTRA.
2. Keselarasan Indikator Kinerja

   Terdapat 6 Indikator Kinerja Program pada RENJA Tahun 2026. Seluruh indikator tersebut telah selaras dengan indikator yang ditetapkan dalam RENSTRA. Tidak terdapat indikator RENJA yang tidak selaras dengan RENSTRA.
3. Keselarasan Target Kinerja

   Target kinerja pada seluruh indikator RENJA Tahun 2026 telah selaras dengan target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Meskipun terdapat perbedaan besaran angka target pada beberapa indikator, seperti pada Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan Indikator Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan, perbedaan tersebut masih dalam koridor pencapaian sasaran RENSTRA dan tidak mengubah substansi program.
4. Akomodasi Program RENSTRA ke dalam RENJA

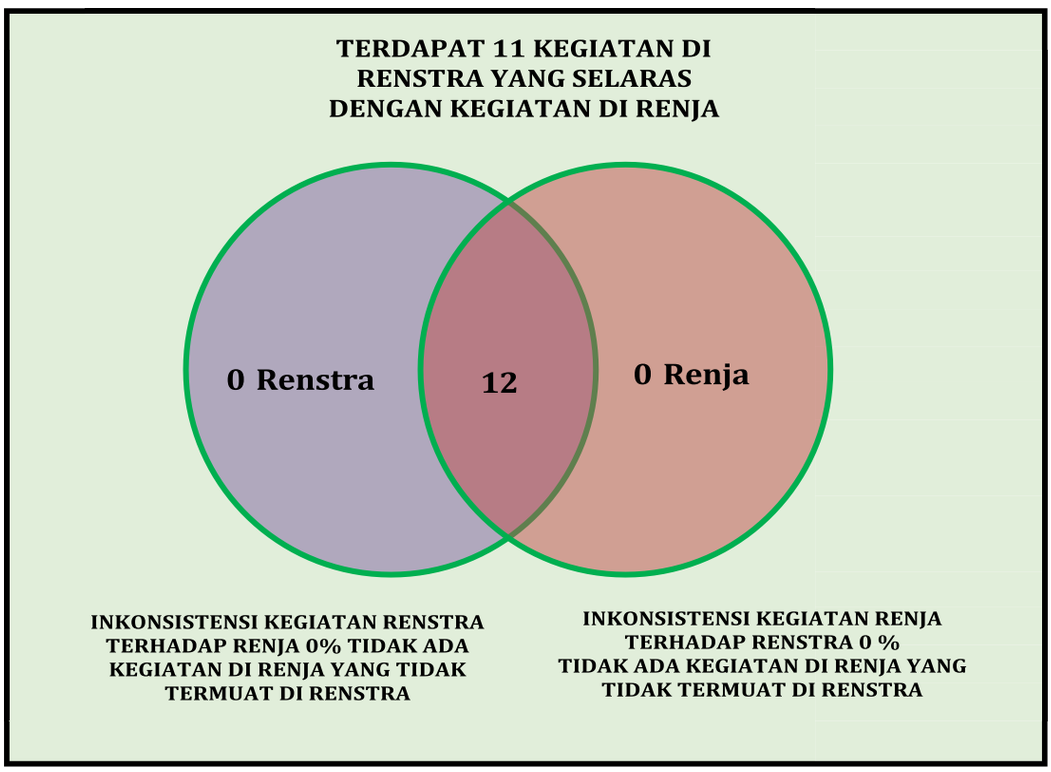
   Seluruh Program yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2025-2029 telah diakomodir dalam RENJA Tahun 2026. Tidak terdapat Program RENSTRA yang tidak diakomodir atau tidak ada dalam dokumen RENJA 2026.

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis sandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 telah 100% selaras dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 telah sejalan dengan arah kebijakan, sasaran, dan target jangka menengah daerah, sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

3.1.2 Keselarasan Kegiatan Renja Tahun 2026 dengan Renstra Periode 2025-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Keselarasan antara dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, terdapat 12 kegiatan yang selaras antara Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kota Batam, tidak ada kegiatan dalam Renja yang tidak tercantum dalam Renstra. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelarasan yang berkelanjutan untuk memastikan konsistensi perencanaan serta keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan arah dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Gambar III. 2
Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Tabel III. 2
Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Kegiatan				
	Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renstra = Renja	Renja ≠ Renstra
1	2	3	4	5	6
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	12	12	0	12	0
JUMLAH	**12**	**12**	**0**	**12**	**0**

Berdasarkan Tabel III.2 di atas, dapat dilihat gambaran keselarasan antara kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Periode 2025-2029 dengan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026.Jumlah kegiatan dalam Renstra 2025-2029 sebanyak 12 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan dalam Renja Tahun 2026 sebanyak 12 kegiatan.

Dari 12 kegiatan Renstra tersebut, terdapat 12 kegiatan yang diiriskan dan dilaksanakan pada Renja Tahun 2026. Hal ini berarti 100% kegiatan Renstra telah diakomodir dalam Renja Tahun 2026. Sementara itu terdapat 0 kegiatan atau 0% kegiatan Renstra yang belum dilaksanakan pada Renja Tahun 2026, sehingga masuk dalam kategori Renstra ≠ Renja.

Selain itu, tidak terdapat kegiatan dalam Renja Tahun 2026 yang tidak tercantum dalam Renstra 2025-2029. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 0 pada kolom Renja ≠ Renstra. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan pada Renja Tahun 2026 telah sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah Renstra.

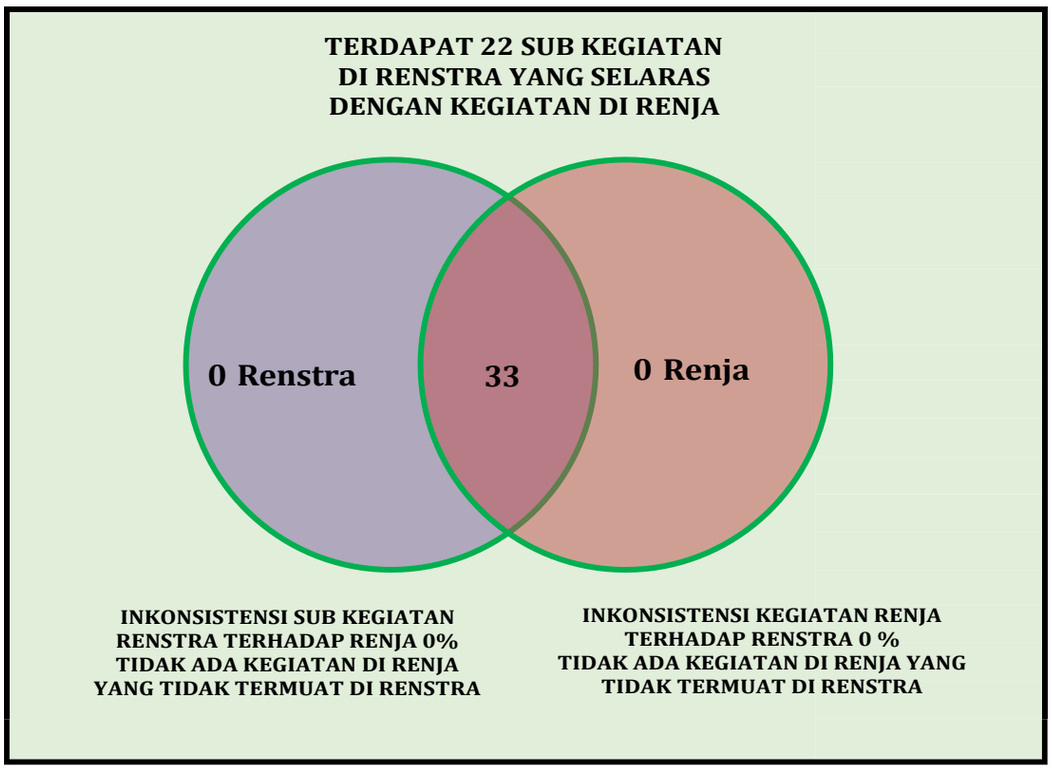
Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan antara Renja Tahun 2026 dengan Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sudah sangat baik. Seluruh kegiatan Renja merupakan turunan langsung dari Renstra dan tidak ada kegiatan baru di luar Renstra.

3.1.3 Keselarasan Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 dengan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Keselarasan antara dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026, terdapat 33 sub kegiatan yang selaras antara Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kota Batam.

Selain itu, ditemukan 0 sub kegiatan dalam Renstra yang belum terakomodasi dalam Renja atau sebesar 0% persen, serta tidak ada kegiatan dalam Renja yang tidak tercantum dalam Renstra. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan konsistensi antara Renstra dan Renja agar pelaksanaan program dan sub kegiatan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih terarah

Gambar III. 3
Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Tabel III. 3
Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan Renstra Periode 2025-2029 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan				
	Renstra	Renja	Renstra ≠ Renja	Renstra = Renja	Renja ≠ Renstra
1	2	3	4	5	6
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	33	33	0	33	0
JUMLAH	**33**	**33**	**0**	**33**	**0**

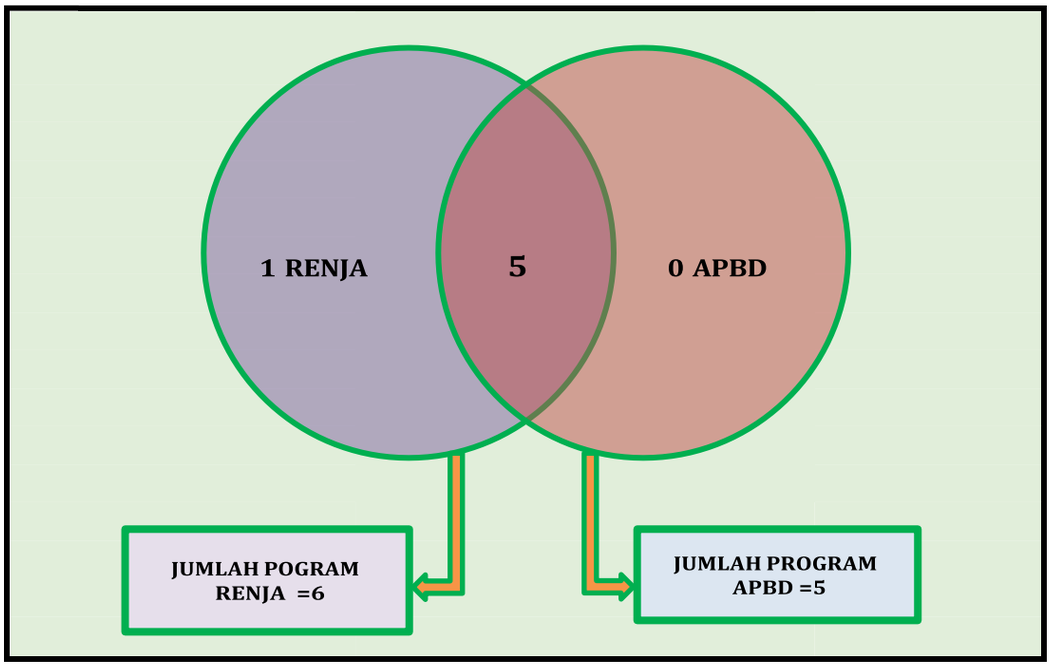
Berdasarkan Tabel III.3 di atas, dapat dilihat jumlah dan tingkat keselarasan sub kegiatan antara Renja Tahun 2026 dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Periode 2025-2029. Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah sub kegiatan dalam Renstra 2025-2029 sebanyak 33 sub kegiatan, sedangkan jumlah sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026 sebanyak 33 sub kegiatan.

Dari 33 sub kegiatan Renstra tersebut, terdapat 33 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Renja 2026. Dengan demikian tingkat keselarasan sub kegiatan mencapai 100%. Sementara itu terdapat 0 sub kegiatan Renstra yang belum dilaksanakan pada Renja 2026 atau sebesar 0%.Yang perlu digarisbawahi adalah pada kolom "Renja ≠ Renstra" menunjukkan angka 0. Hal ini berarti tidak ada satupun sub kegiatan dalam Renja 2026 yang keluar dari Renstra 2025-2029. Seluruh sub kegiatan Renja merupakan penjabaran langsung dari Renstra.

3.1.4 Keselarasan Program Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tingkat kesesuaian program antara Renja 2026 dengan APBD 2026 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program yang direncanakan dalam Renja telah dianggarkan dan diakomodir sepenuhnya dalam APBD Tahun 2026. Tidak terdapat ketidaksesuaian atau deviasi antara perencanaan dan penganggaran.Kondisi ini mencerminkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah berjalan secara sinergis dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Gambar III. 4
Irisan Kesesuaian Program Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Pada Tabel III.4, dijelaskan seluruh 6 program dan 6 indikator dengan targetnya dalam Renja 2026 telah 100% dianggarkan dan diakomodir dalam APBD 2026. Tidak terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran.

Pada Tabel III.4, juga dijelaskan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 telah direncanakan dengan baik. Terdapat 6 program prioritas yang dilaksanakan dengan 6 indikator kinerja utama. Target indikator yang ditetapkan telah sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD, sehingga diharapkan dapat mencapai outcome pelayanan publik yang optimal.

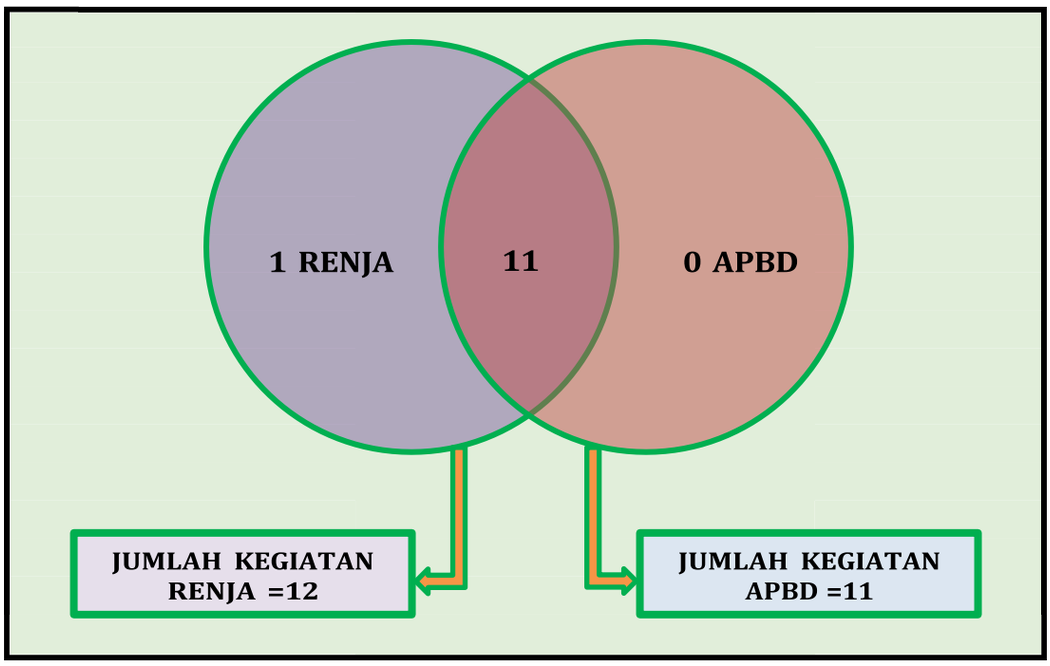
Tabel III.4 membuktikan bahwa telah terjadi integrasi penuh antara perencanaan dan penganggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026. 100% Program dan 100% Indikator beserta targetnya dalam Renja telah diakomodir dalam APBD. Kondisi ini mendukung tercapainya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan.

Tabel III. 4
Sandingan Program RENJA Tahun 2026 Dengan Program APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

NO.	PROGRAM RENJA TAHUN 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	NO.	PROGRAM APBD TAHUN 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	SELARAS/ TIDAK SELARAS/ TIDAK DIAKOMODIR		PERMASALAHAN KETIDAK SELARASAN/ TIDAK DIAKOMODIR
								PROGRAM	TARGET INDIKATOR	
Urusan Unsur Kewilayahan										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	85,3%	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	Selaras	Tidak Selaras	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	31,81%	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	36,99%	Selaras	Tidak Selaras	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	39,8%	3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	42,3%	Selaras	Tidak Selaras	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	47,15%	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	30.78 %	Selaras	Tidak Selaras	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	72,51%	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	79,52%	Selaras	Tidak Selaras	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	58,07%	6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	58,07%	Selaras	Selaras	
Total	6	6			6	6				
Jumlah Program RENJA yang SELARAS dengan RENSTRA:								**6**		
Jumlah Program RENSTRA yang TIDAK SELARAS dengan RENJA :								**0**		
Jumlah Program RENSTRA yang TIDAK DIAKOMODIR/TIDAK ADA di dalam RENJA:								**0**		
Jumlah TARGET INDIKATOR Program RENJA yang SELARAS dengan RENSTRA :									**1**	
Jumlah TARGET INDIKATOR Program RENJA yang TIDAK SELARAS dengan RENSTRA :									**0**	
Jumlah INDIKATOR Program RENSTRA Yang Tidak Ada di dalam RENJA :									**0**	

3.1.5 Keselarasan Kegiatan Renja dan APBD

Gambar III. 5
Irisan Kesesuaian Kegiatan Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Berdasarkan gambar Irisan Keselarasan Kegiatan RENJA dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dapat diketahui bahwa terdapat 12 kegiatan yang tercantum dalam RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 dan juga terdapat 11 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun 2026.

Jumlah kegiatan RENJA yang direncanakan sebanyak 12 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun 2026 sebanyak 11 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut memiliki irisan atau keselarasan antara dokumen perencanaan (RENJA) dengan dokumen penganggaran (APBD), yang ditunjukkan dengan adanya 12 kegiatan pada bagian irisan.

Dengan demikian, tingkat keselarasan kegiatan antara RENJA dan APBD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 dapat dinyatakan 100%, karena seluruh 12 kegiatan yang direncanakan dalam RENJA telah terakomodasi dalam APBD Tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Batam

Kota memiliki dasar penganggaran yang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Keselarasan tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja perangkat daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah diselaraskan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja dan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Tabel III. 5
Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Keselarasan Kegiatan				
	RENJA	APBD	RENJA ≠ APBD [1]	RENJA = APBD [2]	APBD ≠ RENJA [3]
1	2	3	4	5	6
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12	11	1	11	0
Jumlah	**12**	**11**	**1**	**11**	**0**

Berdasarkan table diatas, hasil analisis keselarasan kegiatan antara RENJA dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, terdapat sebanyak 12 kegiatan dalam RENJA dan 11 kegiatan dalam APBD. Dari jumlah tersebut, seluruh 12 kegiatan memiliki kesesuaian antara RENJA dan APBD, sehingga tidak terdapat kegiatan RENJA yang tidak diakomodir dalam APBD maupun kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RENJA.

Dengan demikian, tingkat keselarasan kegiatan RENJA dan APBD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konsistensi yang baik antara dokumen perencanaan dan penganggaran, di mana seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam RENJA telah memperoleh dukungan penganggaran dalam APBD.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah dilaksanakan secara selaras dan konsisten. Selanjutnya, keselarasan tersebut perlu dipertahankan melalui

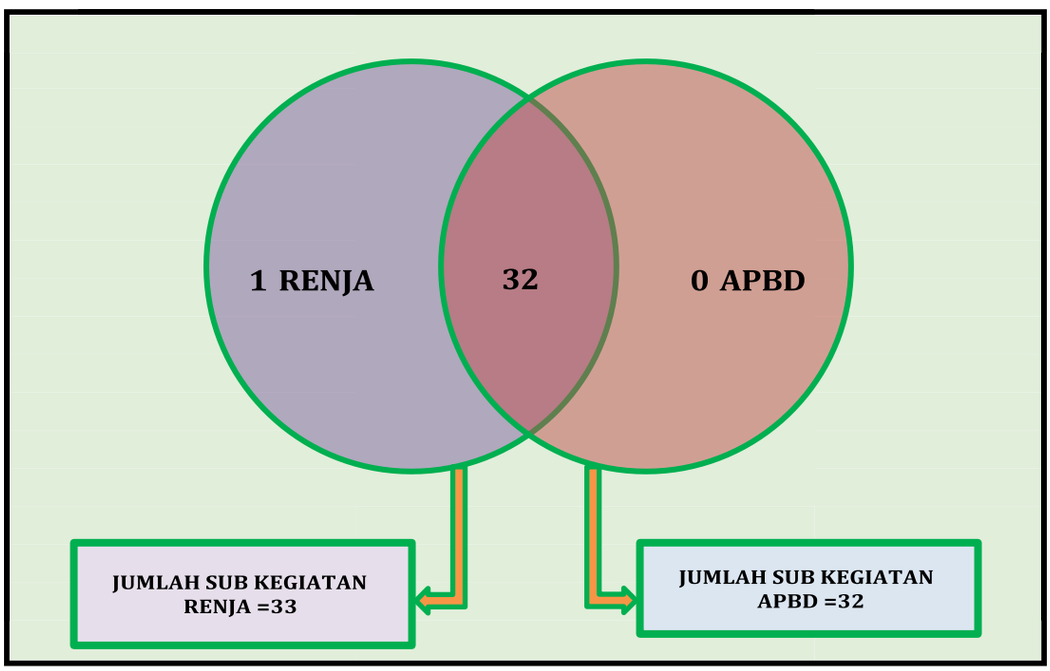
monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja, jadwal pelaksanaan, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

3.1.6 Keselarasan Sub Kegiatan Renja dengan APBD

Pada Sub Bab ini disajikan narasi penjelasan terkait Gambar III.6 yang mengambarkan irisan keselarasan sub Kegiatan Renja APBD Tahun 2026, dari keseluruhan 33 Sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja, sebanyak 33 Sub Kegiatan telah tertampung dan selaras dalam APBD. Terdapat 1 Sub Kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RENJA, Tingkat Keselarasan Sub Kegiatan Renja terhadap APBD mencapai 0,96%.

Secara umum kesesuaian antara Renja dan APBD pada level sub kegiatan sudah sangat baik dengan tingkat keselarasan 100%. Tidak ada sub kegiatan Renja yang tidak dianggarkan. Adanya 1 sub kegiatan tambahan di APBD tidak mengganggu substansi karena seluruh program prioritas Renja telah diakomodir.

Gambar III 6
Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam



Tabel III. 6
Jumlah dan Irisan Keselarasan Sub Kegiatan antara Renja Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Nama Perangkat Daerah	Jumlah dan Irisan Kesesuaian Sub Kegiatan				
	RENJA	APBD	RENJA ≠ APBD [1]	RENJA = APBD [2]	APBD ≠ RENJA [3]
1	2	3	4	5	6
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	33	32	1	32	0
JUMLAH	**33**	**32**	**1**	**32**	**0**

Dari data tersebut dapat disimpulkan Tingkat kesesuaian 100%, Seluruh sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026 telah dianggarkan dalam APBD 2026. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 0 pada kolom "RENJA ≠ APBD".Adanya 1 sub kegiatan tambahan: Terdapat 1 sub kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam Renja. sub kegiatan ini kemungkinan merupakan sub kegiatan bersifat rutin, teknis, atau penjabaran lebih rinci dari program yang sudah ada di Renja.

Tingkat keselarasan: 32/33×100%=0,96% Artinya seluruh perencanaan sub kegiatan telah diakomodir dalam penganggaran. Kesimpulannya Penyusunan APBD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah sepenuhnya mengakomodir seluruh sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2026. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip money follow program dan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017.

3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026

Tabel III. 7
Predikat/Kategori Penilaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kategori	Interval Nilai Realisasi Kinerja S/D Semester I	Interval Nilai Realisasi Kinerja S/D Semester II
1	Sangat Tinggi	ST	45 % ≤ 100 %	91%≤100%
2	Tinggi	T	39 % ≤ 44 %	76%≤90%
3	Sedang	S	33 % ≤ 38 %	66%≤75%
4	Rendah	R	26 % ≤ 32 %	51%≤65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 25 %	≤50%

Penilaian capaian kinerja dan realisasi anggaran dilakukan dengan mengacu pada kriteria dan predikat yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian dibagi menjadi 5 kategori, yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah, dengan interval nilai yang berbeda antara penilaian sampai dengan Semester I dan Semester II.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, untuk penilaian realisasi kinerja sampai dengan Semester I, kategori Sangat Tinggi memiliki interval nilai 45% ≤ 100%, kategori Tinggi 39% ≤ 44%, kategori Sedang 33% ≤ 38%, kategori Rendah 26% ≤ 32%, dan kategori Sangat Rendah ≤ 25%.

Sementara itu, untuk penilaian realisasi kinerja sampai dengan Semester II, kategori Sangat Tinggi memiliki interval nilai 91% ≤ 100%, kategori Tinggi 76% ≤ 90%, kategori Sedang 66% ≤ 75%, kategori Rendah 51% ≤ 65%, dan kategori Sangat Rendah ≤ 50%.

3.2.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2026

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dapat tercapai pada pertengahan tahun anggaran.Pada sub bab ini akan diuraikan capaian kinerja masing-masing Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel III. 8
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RENSTRA Periode 2025-2029

VISI/ MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2026	Realisasi Capaian Tahun 2026 s.d Semester I	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2026 s.d Semester I (%)	Predikat/ Kategori Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026	Target Kondisi Akhir RENSTRA (2029)	Persentase Capaian Kinerja RENSTRA (%)	Predikat/ Kategori Capaian Kinerja RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10	11=7/10*100	12
VISI ”Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”											
Misi ke - 1											
	.Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten/Kota								
		Meningkatnya kontribusi sector perekonomian daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto								
	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro										

1		Persentase PeningkatanProduktifitas UsahaMikro di Kota Batam	Persentase Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan atau jumlah usaha mikro terdaftar	%	1098	147	13,38		948	15,5	
2		Persentase PeningkatanProduktifitas Koperasidi Kota Batam	Persentase Jumlah koperasi sehat/jumlah koperasi RAT	%	100	42,43	42,43		81,25	52,22	
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan										
3		Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasidan Usaha Mikro	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	%	55,90	0	0		91,61	0	
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 1:											
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran :							**18,60**	**Sangat Rendah**		**22,57**	**Sangat Rendah**
Persentase Capaian Misi 1 :							**...**	**...**		**...**	**...**
Pencapaian Visi RPJMD 2025-2029 :										**= Rata-rata keseluruhan tujuan dan sasaran**	

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam rangka mewujudkan Visi "Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata" khususnya pada Misi ke-4.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2026, capaian kinerja pada Misi ke-4 menunjukkan hasil yang sangat baik. Misi ke-4 memiliki 1 Tujuan yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi" dengan 1 Sasaran yaitu "Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik".

Dari 3 indikator yang diukur, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam, memiliki target kinerja tahun 2026 sebesar 1098. Realisasi capaian sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah mencapai 147 atau 15,5% dengan predikat Sangat Rendah.
2. Indikator Persentase Peningkatan Produktifitas Koperasi Kota Batam, memiliki target kinerja tahun 2026 sebesar 100. Realisasi capaian sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah mencapai 42,43 atau 42,43% dengan predikat Tinggi.
3. Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, memiliki target kinerja tahun 2026 sebesar 55,90. Realisasi capaian sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah mencapai 0 atau 0% dengan predikat Sangat Rendah.

.Secara rata-rata, capaian kinerja Tujuan 1 pada Semester I Tahun 2026 adalah 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Begitu pula dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran 1 yaitu 100% dengan predikat Sangat Tinggi.Jika dilihat dari target kondisi akhir RENSTRA 2025-2029, capaian persentase kinerja RENSTRA untuk Tujuan 1 adalah 80% dan untuk Sasaran 1 adalah 100%, keduanya masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Misi ke-1 sampai dengan Semester I Tahun 2026 sudah sangat optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

3.2.2 Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Sampai Dengan Semester I (satu) Tahun 2026

Sebagai bentuk implementasi prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Batam melaksanakan berbagai program prioritas yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam RKPD dan RPJMD Tahun 2026 yang juga telah selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Terdapat 1 prioritas pembangunan yang diimplementasikan Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mendukung dan menjalankan prioritas kota ke-1 yaitu "Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global" dengan 1 program yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Semester I Tahun 2026 yang merupakan akumulasi capaian hingga Triwulan II, secara umum pelaksanaan program prioritas menunjukkan

Tabel III. 9
Capaain Indikator Kinerja Program dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No	Program	Indikator	Target Kinerja RENJA dan Anggaran Tahun 2026 yang di Evaluasi		Capaian Target Kinerja RENJA dan Anggaran Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Semester 1		Kategori Capaian Kinerja dan Anggaran Semester 1	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang berdaya saing dalam pengembangan usaha	**58,07%**	**4.543.049.067**	**21**	**7.714.926**	**36,16**	**0,16**	**Sedang**	**Sangat Rendah**
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	31,81%	89.411.500	**0**	**0**	0	0	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	39,80%	0	0	0	0	0	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

4	Program Pemberdayaan Dan Pelindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	**47,15%**	**269.104.200**	**38,19%**	**94.091.313**	**80,99**	**34.9**	**Sangat Tinggi**	**Sedang**
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan usaha mikro informal dan formal yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	**72,51%**	**2,854,095,100**	**36,68%**	**1.051.408.922**	**50,58**	**36,8**	**Sangat Tinggi**	**Sedang**

BAB IV
ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT SERTA TINDAK LANJUT YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA RENJA BERIKUTNYA

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Keberhasilan pencapaian kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu diidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan kelemahan yang harus diperbaiki, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada Tahun 2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perangkat daerah yang dapat bersifat mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.Untuk itu perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini bertujuan agar faktor pendorong dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara faktor penghambat dapat dicarikan solusi dan strategi penanganannya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara optimal.

Tabel IV. 1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Tujuan/ Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi 1 Mendorong terciptanya pusat pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Komitmen pimpinan dan aparatur kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan

Tujuan/ Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	2 Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.	2 Masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan administrasi pemerintahan.
	3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik, administrasi, dan pengelolaan data pemerintahan.	3 Kemampuan masyarakat dan sebagian aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi belum merata.
	4 Koordinasi dan sinergi antara Dinas, kelurahan, perangkat daerah, serta unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.	4 Koordinasi lintas sektor belum selalu berjalan optimal sehingga dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian beberapa kegiatan.
	5 Adanya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.	6 Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan.
	6 Dukungan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan tertib administrasi pemerintahan.	7 Beban kerja dan kompleksitas pelayanan yang meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
Tujuan Meningkatnya daya saing ekonomi Batam di tingkat nasional	1 Komitmen pimpinan dan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan mudah diakses masyarakat.	1 Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.
	2 Tersedianya standar pelayanan dan prosedur pelayanan sebagai pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	2 Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara lengkap persyaratan dan prosedur pelayanan.
	3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan.	3 Belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses pelayanan.
	4 Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung proses pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.	4 Keterbatasan atau gangguan jaringan internet dapat mempengaruhi kelancaran proses pelayanan berbasis teknologi.
	5 Adanya keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan, waktu dan biaya pelayanan kepada masyarakat.	5 Pemutakhiran informasi pelayanan melalui media digital belum selalu dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Tujuan/ Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	6 Adanya mekanisme pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.	6 Masih diperlukan peningkatan kecepatan dan koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
	7 Adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.	8 Keterbatasan anggaran dapat menghambat pengembangan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	1 Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.	1 Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
	2 Tersedianya regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan standar pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	2 Pemahaman dan penerapan SOP oleh aparatur masih perlu ditingkatkan secara konsisten.
	3 Adanya perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala.	3 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum seluruhnya dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu.
	4 Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi pemerintahan, pengelolaan data, pelaporan, dan pelayanan publik.	4 Gangguan jaringan serta keterbatasan sarana teknologi informasi dapat menghambat kelancaran pekerjaan.
	5 Koordinasi yang baik antara Dinas, Kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program dan pelayanan masyarakat.	5 Koordinasi lintas perangkat daerah terkadang membutuhkan waktu sehingga dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian pekerjaan.
	6 Tersedianya sistem pengawasan internal untuk mendorong tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja.	6 Masih terdapat dokumen administrasi yang memerlukan penyempurnaan dalam hal kelengkapan, ketepatan, dan ketertiban.
	7 Adanya dukungan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, kritik, dan pengaduan terhadap pelayanan publik.	7 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme pelayanan masih beragam.
	8 Penggunaan sumber daya dan anggaran diarahkan berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.	8 Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dapat membatasi optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
	9 Adanya evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.	9 Beban kerja aparatur yang cukup tinggi dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyelesaian pekerjaan.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Prioritas dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan dan melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Renja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menghadapi berbagai dinamika selama Tahun 2026. Terdapat faktor-faktor yang mendorong sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai rencana, serta terdapat pula faktor-faktor yang menghambat sehingga perlu upaya penanganan lebih lanjut.Evaluasi terhadap faktor pendorong dan penghambat pada level program ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja. Hasil identifikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel IV. 2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Prioritas dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Prioritas/ Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Prioritas 1. Penguatan kemandirian perekonomian masyarakat	1 Komitmen Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.	1 Masih terdapat keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus.
	2 Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.	2 Tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya inklusi sosial dan kesetaraan dalam pembangunan masih beragam.
	3 Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Dinas dan Kelurahan.	3 Partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih belum optimal.
	4 Adanya koordinasi antara Dinas, Kelurahan, perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dan stakeholder dalam mendukung pembangunan inklusif.	4 Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kelompok rentan dan permasalahan sosial masih perlu ditingkatkan.
	5 Tersedianya forum musyawarah dan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat sebagai sarana menjaring kebutuhan masyarakat.	5 Aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu belum seluruhnya dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
	6 Pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi untuk memperluas akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat.	6 Kesenjangan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.
	7 Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.	7 Keterbatasan anggaran dapat membatasi cakupan dan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
	8 Dukungan lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam mendorong kebersamaan dan kepedulian sosial.	8 Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam menyebabkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi tidak sama.

Prioritas/ Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	9 Adanya upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik tanpa membedakan latar belakang dan kondisi sosial.	9 Masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
	10 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan kegiatan selanjutnya.	10 Ketersediaan data terpilah mengenai kelompok masyarakat rentan dan kebutuhan spesifiknya masih perlu ditingkatkan.
Program 1. Program Pengembangan UMKM	1 Adanya komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan Kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan serta kemandirian masyarakat.	1 Keterbatasan anggaran dalam mendukung seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat secara optimal.
	2 Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, gotong royong, dan pembangunan di lingkungan Kelurahan.	2 Partisipasi masyarakat belum merata pada seluruh kelompok dan wilayah Kelurahan.
	3 Adanya dukungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, RT/RW, kader, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat.	3 Kapasitas dan kemampuan sebagian kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan pemberdayaan masih perlu ditingkatkan.
	4 Tersedianya forum musyawarah Kelurahan sebagai sarana perencanaan dan penyaluran aspirasi masyarakat.	4 Belum seluruh usulan dan kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
	5 Adanya koordinasi antara Dinas, Kelurahan, perangkat daerah, dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.	5 Koordinasi lintas sektor dalam mendukung beberapa kegiatan pemberdayaan masih perlu dioptimalkan.
	6 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang mendorong peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat.	6 Keterbatasan tenaga pendamping atau narasumber yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kelompok masyarakat.
	7 Adanya potensi sumber daya masyarakat dan lingkungan yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	7 Potensi masyarakat dan lingkungan belum seluruhnya dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.
	8 Dukungan teknologi informasi dan media sosial dalam penyebarluasan informasi kegiatan dan peningkatan akses masyarakat terhadap program pemberdayaan.	8 Kemampuan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi masih terbatas.
	9 Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai dasar peningkatan kualitas program pemberdayaan.	9 Monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan hasil kegiatan pemberdayaan masih perlu ditingkatkan.
	10 Adanya semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan di lingkungan Kelurahan.	10 Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan tingkat kemampuan dan kebutuhan pemberdayaan berbeda-beda.

4.1.3 Faktor Pendorong dan Penghambat terhadap Pelaksanaan Sub Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program perangkat daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasinya.Melalui identifikasi ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat sehingga pelaksanaan sub kegiatan dapat lebih optimal dan mendukung tercapainya target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Tabel IV. 3
Faktor Pendorong dan Penghambat terhadap Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Dibutuhkan untuk Pencapaian Target Kinerja RENJA Berikutnya
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya pedoman dan data perencanaan serta dukungan pimpinan.	Keterbatasan data dan perubahan kebijakan perencanaan.	Meningkatkan koordinasi dan pemutakhiran data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen target dan realisasi kinerja.	Data capaian dari beberapa kegiatan belum seluruhnya tersedia tepat waktu.	Meningkatkan ketepatan waktu pengumpulan data dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya alokasi anggaran dan data kepegawaian.	Perubahan data kepegawaian dapat memerlukan penyesuaian administrasi.	Melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan administrasi pembayaran secara berkala.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan administrasi dan kebutuhan operasional ASN tersedia.	Volume pekerjaan administrasi cukup tinggi.	Meningkatkan tertib administrasi dan pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya dukungan pimpinan dan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi.	Keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan yang perlu disesuaikan dengan tugas kedinasan pegawai.	Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan dan menyusun prioritas pengembangan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian target kinerja.
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan penerangan untuk mendukung kelancaran serta kenyamanan pelaksanaan kegiatan perkantoran.	Keterbatasan anggaran dan kemungkinan keterlambatan dalam pengadaan komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan.	Melakukan perencanaan kebutuhan secara tepat dan pengadaan secara terjadwal agar ketersediaan komponen instalasi dan penerangan dapat mendukung pencapaian target kinerja.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran.	Keterbatasan anggaran serta adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang bersifat mendesak dan tidak selalu dapat diprediksi.	Melakukan perencanaan dan pendataan kebutuhan secara berkala serta mengoptimalkan pengadaan sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelaksanaan kegiatan perkantoran.	Keterbatasan anggaran serta adanya kebutuhan cetakan dan penggandaan yang dapat berubah sesuai pelaksanaan kegiatan.	Melakukan perencanaan kebutuhan secara berkala dan pengadaan sesuai skala prioritas agar ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dapat terpenuhi tepat waktu.
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan program perangkat daerah.	Keterbatasan anggaran serta penyesuaian waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan jadwal pihak terkait.	Melakukan perencanaan jadwal dan kebutuhan koordinasi secara lebih efektif serta menentukan skala prioritas agar pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi berjalan optimal.

Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Dibutuhkan untuk Pencapaian Target Kinerja RENJA Berikutnya
Pengadaan Mebel	Adanya kebutuhan mebel yang memadai untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.	Keterbatasan anggaran serta kebutuhan pengadaan mebel yang harus disesuaikan dengan kondisi dan skala prioritas.	Melakukan pendataan kebutuhan dan kondisi mebel secara berkala serta memprioritaskan pengadaan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya kebutuhan peralatan dan mesin untuk mendukung kelancaran serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan perkantoran.	Keterbatasan anggaran serta kebutuhan peralatan dan mesin yang harus disesuaikan dengan kondisi dan skala prioritas.	Melakukan pendataan kebutuhan secara berkala dan memprioritaskan pengadaan peralatan dan mesin sesuai kebutuhan serta ketersediaan anggaran.
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya kebutuhan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta pelayanan pemerintahan.	Keterbatasan anggaran serta kebutuhan pengadaan yang harus disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan skala prioritas.	Melakukan pendataan dan evaluasi kebutuhan kendaraan dinas serta memprioritaskan pengadaan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, air, dan listrik yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perkantoran.	Keterbatasan anggaran serta kemungkinan adanya kenaikan biaya penggunaan layanan komunikasi, air, dan listrik.	Melakukan pengendalian dan pemantauan penggunaan layanan secara berkala serta mengoptimalkan anggaran sesuai kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan layanan.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin untuk menunjang kelancaran mobilitas dan pelaksanaan tugas kedinasan.	Keterbatasan anggaran serta adanya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan yang dapat berubah sesuai kondisi kendaraan dan ketentuan yang berlaku.	Melakukan pemeliharaan kendaraan secara berkala dan memastikan pembayaran pajak tepat waktu sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional secara rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan lapangan.	Keterbatasan anggaran serta biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan yang dapat berubah sesuai kondisi kendaraan dan ketentuan yang berlaku.	Melakukan pemeliharaan kendaraan secara berkala serta memastikan pembayaran pajak dan perizinan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin secara berkala untuk menjaga kondisi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.	Keterbatasan anggaran serta adanya kerusakan peralatan dan mesin yang tidak selalu dapat diprediksi.	Melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan serta mesin secara berkala dan memprioritaskan perbaikan sesuai kondisi dan ketersediaan anggaran.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor secara berkala untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap layak, aman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	Keterbatasan anggaran serta adanya kerusakan bangunan yang tingkat dan kebutuhannya dapat berbeda-beda.	Melakukan pemeriksaan kondisi gedung secara berkala dan memprioritaskan pemeliharaan atau rehabilitasi sesuai tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Dibutuhkan untuk Pencapaian Target Kinerja RENJA Berikutnya
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Adanya kebutuhan pelayanan dan penunjang operasional BLUD yang optimal untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.	Keterbatasan anggaran serta kebutuhan pelayanan dan operasional yang dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan BLUD.	Melakukan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan pelayanan secara efektif serta memprioritaskan kegiatan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perangkat daerah.	Keterbatasan data yang diperlukan serta adanya perubahan kebijakan dan ketentuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.	Meningkatkan koordinasi dan pengumpulan data secara tepat waktu serta menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang berlaku.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya data dan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui capaian dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.	Keterbatasan dan ketepatan waktu penyampaian data kinerja dari masing-masing bidang/unit kerja.	Meningkatkan koordinasi dan ketepatan waktu dalam pengumpulan serta verifikasi data kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pencapaian target kinerja berikutnya.
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Adanya kebutuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi untuk memastikan koperasi menjalankan kegiatan sesuai ketentuan serta meningkatkan tata kelola koperasi.	Keterbatasan sumber daya pemeriksa/pengawas serta belum optimalnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data koperasi.	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada koperasi serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan sesuai prioritas dan ketentuan yang berlaku.
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Adanya kebutuhan peningkatan pemahaman perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk mendukung pengelolaan koperasi yang profesional.	Keterbatasan waktu, anggaran, dan partisipasi SDM koperasi dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi.	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan secara terarah sesuai kebutuhan koperasi serta mengoptimalkan partisipasi SDM koperasi.
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Adanya kebutuhan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pembentukan koperasi serta pengembangan potensi ekonomi.	Keterbatasan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam proses pembentukan serta pengelolaan koperasi.	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan serta memberikan pemahaman terkait pembentukan dan pengelolaan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya lainnya termasuk Daerah Kabupaten/Kota	Adanya kebutuhan pengembangan kemitraan koperasi untuk memperluas jaringan usaha dan meningkatkan kapasitas serta daya saing koperasi.	Terbatasnya akses koperasi terhadap calon mitra serta belum optimalnya kesiapan koperasi dalam membangun kemitraan usaha.	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dengan calon mitra serta memberikan pendampingan kepada koperasi agar kemitraan dapat terjalin dan berkembang secara berkelanjutan.
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Adanya kebutuhan pelaporan koperasi yang tertib dan tepat waktu sebagai dasar pemantauan serta evaluasi perkembangan koperasi.	Belum optimalnya ketepatan waktu dan kelengkapan data laporan yang disampaikan oleh koperasi.	Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan koperasi serta mengoptimalkan pemantauan pelaporan agar data yang disampaikan lengkap dan tepat waktu.
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Adanya kebutuhan pengembangan kemitraan usaha untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha mikro.	Terbatasnya akses usaha mikro terhadap mitra usaha serta belum optimalnya kesiapan pelaku usaha dalam menjalin kemitraan.	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan usaha mikro, memperluas koordinasi dengan calon mitra untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan

Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Dibutuhkan untuk Pencapaian Target Kinerja RENJA Berikutnya
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Adanya kebutuhan pelaku usaha mikro untuk memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan guna mendukung legalitas dan pengembangan usaha.	Masih adanya pelaku usaha mikro yang belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan usaha.	Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam proses pengurusan perizinan usaha.
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Adanya kebutuhan sertifikasi dan standardisasi untuk meningkatkan kualitas, legalitas, dan daya saing produk usaha mikro.	Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai persyaratan dan proses sertifikasi serta standardisasi usaha.	Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dan standardisasi usaha.
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Adanya potensi dan kebutuhan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing pelaku usaha.	Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan, pengetahuan, dan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.	Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha mikro sesuai potensi dan kebutuhan pelaku usaha.
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Adanya kebutuhan penyediaan tempat promosi untuk membantu usaha kecil memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk.	Keterbatasan tempat dan sarana promosi serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas oleh pelaku usaha kecil.	Mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan tempat promosi serta meningkatkan fasilitasi kepada pelaku usaha kecil dalam memasarkan produknya.
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Adanya kebutuhan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pelaku UMKM serta kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.	Masih terbatasnya pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM serta keterbatasan waktu dan anggaran dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku UMKM.
Pengembangan Usaha Mikro	Adanya potensi dan kebutuhan pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing usaha.	Masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usaha serta akses terhadap pasar dan permodalan.	Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi usaha mikro dalam aspek pengelolaan usaha, pemasaran, dan akses permodalan.

Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Dibutuhkan untuk Pencapaian Target Kinerja RENJA Berikutnya
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Adanya kebutuhan pendampingan dan pengembangan usaha mikro melalui inkubator untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha.	Keterbatasan kapasitas pelaku usaha dalam mengikuti proses inkubasi serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung.	Meningkatkan pendampingan dan pembinaan melalui program inkubasi yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi usaha mikro.
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Adanya kebutuhan peningkatan kualitas produksi, pemasaran, SDM, serta pemanfaatan desain dan teknologi untuk mendukung pengembangan dan daya saing usaha.	Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha dalam pengembangan produk dan pemasaran.	Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dalam aspek produksi, pemasaran, SDM, desain, serta pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan pelaku usaha.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sampai dengan Semester I Tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keselarasan antara Renstra, Renja, dan APBD

   Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 telah selaras dengan dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Renja Tahun 2026. Penganggaran pada APBD Tahun 2026 juga telah mendukung sepenuhnya terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Hasil Capaian Visi dan Misi Daerah

   Capaian Visi "Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata" khususnya pada Misi ke-4 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang rata-rata telah mencapai 100% dari target Tahun 2026 dengan predikat Sangat Tinggi.

3. Hasil Capaian Prioritas dan Program Pembangunan

   Prioritas pembangunan daerah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik telah diimplementasikan melalui program-program prioritas. Secara umum, capaian kinerja program pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah memenuhi target yang ditetapkan.

4. Hasil Capaian Kinerja Sub Kegiatan

   Pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah berjalan sesuai dengan rencana. Capaian kinerja sub kegiatan secara keseluruhan menunjukkan progres yang positif dan mendukung tercapainya target indikator kinerja program.

5. Hasil Capaian Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah

   Realisasi anggaran pembangunan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan tingkat penyerapan yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

   Faktor pendorong utama pencapaian kinerja adalah komitmen pimpinan, sinergi

antar stakeholder, dan dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dinamika perubahan regulasi, dan keterlambatan proses administrasi.

7. Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Evaluasi Renja

   Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi Renja meliputi keterlambatan penyampaian data dukung dari unit pelaksana, belum optimalnya sistem pelaporan berbasis elektronik, dan perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam analisis data kinerja.

8. Hal-hal Penting Lainnya

   Inovasi pelayanan publik berbasis digital yang diterapkan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian target RPJMD 2025-2029.

5.2 Rekomendasi

Untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada periode selanjutnya, berikut beberapa rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan:

1. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan penganggaran antara Renstra, Renja, dan APBD agar setiap program dan kegiatan benar-benar prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat.
2. Mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi data.
4. Melakukan penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja agar kualitas laporan dan analisis semakin meningkat.
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan survei IKM sebagai bahan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
6. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2025-2029.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Salim, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda-/IVc
NIP. 198709262007011001